



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM/AUDIENSI
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)/Audiensi
Dengan : Bupati dan DPRD Natuna
Hari, Tanggal : Selasa, 4 Februari 2020
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 12.52 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
Ketua Rapat : DR. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Acara : Audiensi
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**
34 dari 51 orang Anggota dengan rincian:
1. **Fraksi PDI Perjuangan**
1. Dra. Sri Rahayu
2. dr. Ribka Tjiptaning
3. Dr. H. Edy Wuryanto, S.Kp., M.Kep.
4. H. Imam Suroso, S.H., S.Sos.
5. Rahmad Handoyo, S.Pi., M.M.
6. Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum
7. DR. Dewi Aryani, M.Si

2. **Fraksi Partai Golongan Karya**
1. Emanuel Melkiades Laka Lena
2. Drs. H. Darul Siska
3. Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H.
4. Dra. Wenny Haryanto, S.H.
5. M. Yahya Zaini, S.H.

3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**
1. dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR
2. Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M.
3. Ir. Sri Meliyana

4. Ade Rizki Pratama, SE, MM
5. drg. Putih Sari
6. Dra. Hj. Ruskati Ali Baal

4. **Fraksi Partai Nasionalis Demokrat**

1. Felly Estelita Runtuwene, S.E.
2. Hj. Sri Kustina
3. Drs. Fadholi
4. Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T.
5. drg. Hj. Hasnah Syam, Mars.

5. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

1. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. H. Haruna, M.A., M.B.A.

6. **Fraksi Partai Demokrat**

1. Drs. H. Zulfikar Achmad
2. Dra. Lucy Kurniasari
3. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.
4. Muhammad Dhevy Bijak

7. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

1. H. Ansory Siregar
2. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
3. Dr. Hj., Netty Prasetyani, M.Si.
4. H. Alifuddin, S.E., M.E.

8. **Fraksi Partai Amanat Nasional**

1. Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.

9. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

1. -

B. PEMERINTAH

1. Ketua DPRD Kabupaten Natuna beserta jajaran;
2. Bupati Natuna, beserta jajaran;
3. Perwakilan Masyarakat

KETUA RAPAT (DR. HJ. NIHAYATUL WAFIROH, MA):

Perhatian yang besar terhadap Natuna. Dan kita tidak ingin juga ada hal-hal yang terkait Natuna tidak bisa kita bicarakan. Oleh sebab itu Pimpinan dan Anggota Komisi IX berkomitmen untuk bisa menerima Bapak/Ibu pada hari ini.

Sebelum kita mulai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada hari ini marilah kita membaca do'a bersama semoga rapat kita pada hari ini berjalan lancar. Berdo'a dipersilakan.

(DOA BERSAMA)

Aamiin Aamiin Ya Robbal 'Aalaamiin.
Terima kasih.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Rapat ini saya buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)

Sebelum kita mulai rapat, kita batasi dulu waktu RDPU kita pada hari ini. Saya tawarkan hingga Pukul 12.30. Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Karena kita Jam 13.00 ada rapat dengan BKKBN.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Kami persilakan kepada Bupati, Ketua DPRD, dan juga perwakilan dari masyarakat Natuna untuk menyampaikan maksud kedatangannya ke Komisi IX dan hal-hal penting lainnya.

Kepada Bapak Bupati kami persilakan.

BUPATI NATUNA:

Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pimpinan, Bapak Pimpinan Komisi IX yang kami hormati;
Pimpinan Rapat yang kami hormati; beserta
Seluruh Anggota Komisi IX yang kami hormati dan kami banggakan.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat *Allah Subhaanahuata'aala* Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bersama-sama di ruangan rapat Komisi IX ini.

Adapun maksud kedatangan kami disini ingin menyampaikan amanah dari masyarakat Natuna yang sudah diamanahkan kepada kami untuk ke Jakarta ini. Yang pertama untuk menemui Bapak Presiden untuk menyampaikan itu.

Yang selanjutnya, karena ada wakil rakyat kami disini maka kami datanglah ke Komisi IX ini ingin menyampaikan amanah itu dimana masyarakat kami di Natuna itu ada sedikit kekhawatiran tadinya tentang adanya evakuasi masyarakat kita dari Wuhan (China) dari Tiongkok ke Natuna. Saya kira itu hal yang wajar, karena maklumlah kami di perbatasan luar apabila mendengar 'karantina' itu agak was-was bahasa itu. Jadi dirubahlah jadi bahasa 'observasi' sekarang.

Kami berharap yang pertama itu agar tempat observasi itu ditempatkan di kapal perang/di KRI. Karena kita punya KRI yang besar, Dr. Suharso, dan KRI Semarang. Dr. Suharso itu bisa menampung sampai 400 orang di KRI itu, dan peralatannya semua lengkap.

Sekarang di darat kalau kita bicara, kalau rumah sakit umum daerah kami itu tipe C. Jadi kalau tipe C Bapak maklum, kelengkapannya sangat minim. Dokternya kami minim juga. Untung dibantu sama dokter dari pusat yang 3 bulan sekali diganti, itu yang bantu.

Dan memang disana ada rumah sakit integrasi TNI, yaitu di Pangkalan Udara Ranai, yang dokternya juga terbatas. Jadi masyarakat kami berharap demikian, kalau bisa ini ditempatkan di kapal.

Tadi kami mendapatkan penjelasan dari Menkes bahwa tidak ada tempat evakuasi itu di negara-negara lain juga yang ditempatkan di kapal. Tapi kami berpikir, orang kalau di taruh di darat terus, ini tadi warga kita ini di Wuhan inikan di darat, sekarang di Natuna di darat lagi, di isolasi lagi, bisa *stress* lagi. Kalau di kapal kan bisa jalan-jalan di laut. Itu pandangan kami.

Yang berikutnya, masyarakat kami berharap bahwa Menteri Kesehatan dalam masa observasi ini berkantor di Natuna. Dan itu sudah dipenuhi oleh Menteri Kesehatan. Rencananya tadi Beliau mau berangkat kesana. Tapi karena kami ada disini menerima kami, dan ada ratas nanti dengan Presiden tentang masalah ini juga, sehingga Beliau menunda besok ke Natuna. Itu bisa membuat rasa aman dan rasa tenang warga kami di Natuna.

Yang selanjutnya, warga kami meminta agar di bangun posko-posko kesehatan, posko pelayanan cepat tanggap. *Alhamdulillah* saya juga sudah memerintahkan kadiskes saya untuk segera membentuk posko pelayanan cepat tanggap itu dengan memfungsikan semua puskesmas yang ada di Natuna, kita buat sebagai posko pelayanan cepat tanggap. Dan kita juga akan bangun posko terpadu di Pantai Piwang namanya yang baru kita bangun disitu bersama TNI/Polri dan pemerintah daerah. Jadi seluruh tenaga kesehatan kita satukan disitu.

Yang selanjutnya, masyarakat kami minta seandainya nanti ada lagi kegiatan-kegiatan apa yang besar di Natuna minta tolong di sosialisasikan dulu. Dan soal ini memang terus terang kami akui informasinya itu *last minutes*, besok mau masuk hari ini kita dapat, sore. Dan tadi Pak menteri memang mengakui, Pak Menkopolkam juga mengakui memang kita memberikan informasi itu memang keterlambatan informasi. Kenapa, karena Beliau fokus, waktu itu Menteri Kesehatannya fokus di Wuhan itu untuk bagaimana cepat mengeluarkan warga kita, karena WHO sudah mau memberikan waktu secepat mungkin itu ditutup, tidak boleh ada yang keluar dan masuk. Jadi Pak Menkes dengan lobi-lobinya bisa dapat mengeluarkan orang kita yang sudah di seleksi bahwa itu sehat.

Yang terinfeksi itu tidak dibenarkan pulang ke Indonesia. Walaupun warga negara Indonesia tidak dibenarkan. Jadi yang dibenarkan pulang itu yang sudah di cek kesehatannya disana, yang dinyatakan sehat, maka boleh keluar dengan batas waktu tertentu/secepatnya. Itu makanya begitu sudah ada *green light* dari

Pemerintah Tiongkok barulah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri, dan itu baru kami disampaikan informasinya.

Saya pas berada rapat di Polda Batam tentang masalah keamanan khusus di Batam. Mau pulang informasi dapatnya pesawat sudah tidak ada lagi. Pesawat satu hari satu kali. Besoknya minggu tidak ada penerbangan. Mau tidak mau Senin saya baru bisa pulang. Dua malam ini saya tidak bisa tidur di Batam. Sebentar bangun-sebentar bangun, ini bagaimana rakyat saya ini. Kami sama-sama Ibu Wakil kebetulan. Pas itu kami juga mengambil langkah-langkah tadi membentuk posko pelayanan, dan memberikan juga pencerahan kepada masyarakat. Bapak Ketua Dewan juga, kebetulan Beliau yang berada disana waktu datang. Jadi memang lelah Ketua Dewan saya ini. Sampai jam dua subuh (02.00), jam lima subuh (05.00), diminta bertanggungjawab dari masyarakat.

Terus *insya Alloh* kalau tidak ada halangan tanggal 7 besok hari Jum'at kami akan mengadakan do'a bersama di Masjid Agung Natuna. Dan kami mengundang Bapak Menkopolkam untuk bersama-sama disana, dan Beliau sudah menjanjikan untuk hadir disana. *Insya Alloh* mudah-mudahan dengan do'a bersama itu bisa menyejukkan, bisa menenangkan masyarakat Natuna dengan isu Virus Corona ini.

Saya kira sementara itu yang kami sampaikan.

Terima kasih.

Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terima kasih Pak.

Saya tidak bisa membayangkan bagaimana khawatirnya Pak Bupati terhadap warganya dalam kondisi yang tidak menentu. Apalagi kabarnya sore sehari sebelum rombongan dari Wuhan datang.

Selanjutnya Bapak Ketua DPRD, silakan.

KETUA DPRD NATUNA:

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat dan Bapak-bapak/Ibu-ibu Anggota Komisi IX.

Perkenalkan, nama saya Anis Putra, saya Ketua DPR Kabupaten Natuna. Saya disini sudah beberapa hari memang kurang istirahat, karena mendampingi terus masyarakat yang dituntut untuk menyampaikan aspirasi kepada pemangku kebijakan yang tertinggi.

Yang di lapangan itu kemarin ada Pak Menteri juga sudah kami sampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Dan Beliau terima cuma waktu di lapangan Beliau tidak bisa memberi keputusan dan tidak mempunyai kebijakan. Jadi disitu kami/DPRD Kabupaten Natuna merasa posisi kami adalah posisi yang sangat sulit saat itu.

Dan mungkin disini kami juga membawa perwakilan-perwakilan masyarakat, ada juga ketua dari MPC Pemuda Pancasila dari Universitas STAI Natuna, ada juga

dari Ketua KNPI, ada juga dari mahasiswa Natuna yang berada di Jakarta dan di Bandung ikut hadir bersama kami.

Dan mungkin yang lebih jelas agar masyarakat merasa puas atas aspirasinya akan tersampaikan, atau lebih jelas disampaikan Ketua KNPI ingin menyampaikan agar dapat teman-teman di Natuna agak puas, karena yang menyampaikan langsung dari masyarakat.

Terima kasih Ibu.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ketua DPRD.

Silakan mungkin ada perwakilan dari masyarakat/tokoh masyarakat untuk bisa menyampaikan. Salah satu ya, silakan Pak.

PERWAKILAN DARI UNIVERSITAS NATUNA:

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pimpinan Rapat yang saya hormati dan para Anggota,

Pada kesempatan ingin disampaikan beberapa hal. Pertama ingin disampaikan kenapa Bupati Natuna, Ketua DPRD Natuna, dan kami ini sampai datang ke Jakarta. Itu berawal dari gejalak-gejalak masyarakat kita menyampaikan aspirasi. Dan puncaknya pada hari Sabtu, dan hari Senin pagi jam 10.30 lebih kurang Bupati Natuna, Wakil Bupati Natuna 'dipaksa' seolah-olah seperti itu dihadirkan di tempat demonstrasi, tempat masyarakat berkumpul di gedung DPRD Natuna. Ketika saat itu singkat ceritanya masyarakat meminta kepada Bupati sebagai penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan keluhan kesah, rasa gunda gulana masyarakat Natuna itu kepada Presiden. Oleh sebab itu kami ini belum merasa aman juga kalau tidak membawa hasil-hasil yang konkrit.

Pertama ketemu Presiden, itu menjadi tuntutan masyarakat. Hari ini SMS masuk "tidak ada *gune* kalian datang ke Jakarta itu kalau tidak bisa ketemu Presiden", itu bahasa sana begitulah kira-kira. Jadi harapan kami barangkali DPR RI bisa memfasilitasi kita bertemu dengan Presiden.

Yang kedua harapan kami, selama kegiatan yang ada disana maka mungkin ada satu sikap bersama antara eksekutif dan legislatif sama-sama bermukimlah di Natuna, supaya kami ini merasa diorbankan juga. Karena ada anggapan "kenapa Natuna ditempatkan? Natuna itu kecil, jauh, penduduknya sedikit", kan menimbulkan multitafsir yang bermacam-macam bahwa kami ini kalau terjangkit pun tidak ada masalah, dampaknya kecil bagi Indonesia, seperti itu kira-kira perasaan yang muncul di masyarakat.

Yang kemudian yang ingin disampaikan, memang kita ingin menegaskan seperti Bupati tadi bahwa segala kebijakan pusat yang ada di daerah, terutama di Natuna, kita berharap harus dikomunikasikan dan dimusyawarahkan pada masyarakat setempat. Ini berkali-kali kegiatan/kebijakan yang ada di Natuna seringkali mengabaikan kita yang ada di daerah.

Selanjutnya yang ingin kami sampaikan bahwa, Natuna itu punya potensi dan seterusnya, saya kira sudah tahu, tidak perlu saya sampaikan. Tapi sekarang tingkat

kepemerintahan hanya kabupaten. Sementara pimpinan TNI kita disana tingkatnya sudah tinggi, sudah kolonel semua. Kecuali kodimnya yang belum. Mayor Jenderal ya. Maka kami/masyarakat dan Bupati juga berpikir sudah saatnya status pemerintah di Natuna itu ditingkatkan menjadi provinsi, sehingga segala kebijakan yang ada di pusat itu bisa diintegrasikan dengan cepat ke daerah. Karena memang daerah kita itu jauh, kemudian memiliki kekhususan tersendiri.

Saya kira demikian. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terima kasih Pak.

Jadi beberapa tuntutannya yang pertama adalah membangun posko-posko pelayanan, agar masyarakat Natuna itu memiliki rasa aman. Dan bila ada sesuatu bisa gampang untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatannya. Saya pikir ini sangat logis ketika Bupati, DPRD, dan juga masyarakat Natuna meminta kedepannya bila ada hal-hal serupa mohon dilakukan komunikasi dan sosialisasi. Jadi tidak tiba-tiba datang. Kalau ini program yang menyejahterakan ya. Ini sesuatu yang membikin takut dunia tiba-tiba langsung datang tanpa ada komunikasi, ada sosialisasi. Jadi kedepannya mungkin ada komunikasi dan sosialisasi yang lebih mendalam.

Bapak/Ibu yang saya hormati, Anggota Komisi IX,

Saya buka mungkin kesempatan untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat, saya buka untuk Anggota Komisi IX.

Silakan Pak Nabil.

F-PDIP (MUHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum):

Tadi saya mau tanya, Bapak yang terakhir bicara Pak Siapa, dari mana ya?

KETUA RAPAT:

Dari perwakilan perguruan tinggi. Apa namanya perguruan tingginya Pak? STAI? Terima kasih.

Ada yang berbicara? Pak Imam Suroso silakan.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos., S.H., M.M):

Terima kasih Ibu Ketua dan teman-teman Komisi IX.

Yang saya hormati, Pak Bupati Natuna, Pak Ketua DPRD Kabupaten Natuna, yang dari Universitas, dari Perwakilan Tokoh Masyarakat Natuna..

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang pertama sekali saya terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu semua di Natuna, menjadi masukan bagi saya. Apa yang sudah disampaikan Pak Bupati sama perwakilan tadi teman-teman sudah mencatat, dan saya sudah mencatatnya. Diantaranya ingin ditingkatkan dari kabupaten, karena SDM nya sudah tinggi, jadi provinsi. Sudah kami catat juga.

Kaitannya dengan tadi Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa saya ini keterlambatan sosialisasi, itu betul. Kemarin teman-teman sama saya juga sudah rapat kerja dengan Menteri Kesehatan yang kaitannya dengan Natuna, dengan Corona itu. Intinya sudah kami tegur. Tegurnya seperti apa, bagaimana sosialisasinya, konsolidasinya pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten. Jadi intinya memang itu sifatnya kilat. Ini namanya musibah dunia Pak. Bukan hanya di Indonesia, dunia. Amerika, Australia, China, semuanya Pak. *Alhamdulillah* rakyat Indonesia belum terkena musibah Corona. Sedangkan permintaan dari DPR, masyarakat, "Pemerintah harus tanggungjawab, pulangkan itu warga kita 245 itu". Akhirnya pemerintah kita merespon. Bapak musti lihat di TV-TV itu *raining rate*. Berdasarkan itu semua segera dipulangkan, karena ini tanggungjawab negara.

Kenapa dipilih ke Natuna yang saya lihat, saya analisa, saya evaluasi? Karena hanya Natuna lah strategis untuk menyelamatkan WNI kita. Warga Natuna pun harus berpikir jauh bagaimana kalau itu mahasiswa-mahasiswi kita, yang disanakan banyak mahasiswanya itu.

Sedangkan Bapak tadi betul, Menteri Luar Negeri jelas, Menteri Kesehatan jelas, orang-orang itu sehat. Kemarin yang 4 dia dipindah tidak mau, dia sudah nyaman disana. Terus ada 238 itu yang lolos seleksi itu di seleksi, ada 3. Ini belum tentu Corona. Pokoknya yang mengandung penyakit tidak mau, biar disana. Akhirnya 3 lolos. Inginnya pulang. Inikan yang menyeleksi dari WHO, negara-negara lain, dan Indonesia. Akhirnya yang lolos yang 238. Itu sudah *clear*, seperti Bapak Bupati sampaikan itu sudah betul.

Terus akhirnya pulanglah di kawal. Pulang pun di Batam Bapak bilang disemproti semua anti virus dan seterusnya, masuk semua TV. Kalau warganya ada satu-dua yang begitu itu wajar saja, kaget Pak. Disini tugas Bapak selaku kepala pemerintahan, Mas yang ganteng ini selaku ketua rakyat/ketua dewan, disosialisasikan. Itu orang kita, orang sehat.

Kita kemarin sudah kita complain, Komisi IX sudah complain sama Pemerintah. Pemerintah betul Pak, memang Pak ini kita terlambat bisa. Namun inikan *emergency*, kalau tidak cepat dilarang sama WHO. Itu *alhamdulillah* makanya Presiden Jokowi itu di *running text* "terima kasih atas kecepatan pemulangan WNI kita", artinya terkejar.

Jadi menurut saya, Bapak sudah ketemu Menkopolhukam. Menkes disini sudah di bai'at, sudah dimarah lengkap sama anggota Komisi IX. Kita sepakat. Ini cuma pengembangan Bapak selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah, kan Bapak pemerintah pula ini. Bapak ini DPR sama dengan saya juga wakil rakyat, sejujukkan rakyat. Dan saya setuju bapak mengadakan do'a bersama itu dalam rangka menyejukkan, itu bagus pula. *Insya Alloh* kalau ada waktu pun saya *Insya Alloh* akan ikut kesana tidak masalah berdo'a itu, karena dalam rangka menyejukkan rakyat.

Soalnya ini Pak, ini mohon maaf, menjelang pilkada ini setan-setan bergentayangan di seluruh Indonesia. Dia berstrategi, pencitraan, macam-macam Pak. Ini Bapak ini masih dipercaya menjabat, sejujukkan. Kalau namanya setan kan tidak ada urusan, yang penting target kita masuk dipilih jadi bupati. Nanti ada *rival-rival* Bapak. Lihat siapa yang menggerakkan masyarakat, itu tidak murni semua

masyarakat, saya yakin tidak. Dia menggerakkan dibiayai. Itulah strategi Pak. Kalau bapak kan sudah orang negara, orang rakyat, mainkan Pak. Terus terang saja saya tetap memantau.

Contoh Pak, ini mohon maaf, ketika Natuna mau disikat Tiongkok, mau diambil perbatasan, pemerintah pusat ngamuk, DPR ngamuk. Akhirnya aman. Jangan dikira, Natuna itu masih tanggungjawab negara pusat. Anggaran kita masih *ngucur* terus, APBN ngucur ke APBD. Nanti kurang tambahin lagi. Makanya rakyat jangan begitu, yang pulang itu saudara-saudara kita pula. Jadi saya terima kasih Pak Bupati, Pak Ketua DPR, *panjeuneungan* menyejukkan rakyat. Daripada orang-orang yang menyemangati untuk tidak bagus.

Jadi sementara dari saya itu, Ibu Ketua. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya yang tidak berkenan.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Begitu ya Pak, betul ya Pak ya? Betul, siap.
Kita sebelah kiri dulu, Pak Zul.

F-PD (DRS. H. ZULFIKAR ACHMAD):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Perkenalkan saya dari dapil Jambi, dari Partai Demokrat.

Begitu kami disini mendengar, sama dengan pemikiran Bapak juga. Saya juga mantan bupati Pak dua periode, jadi samalah bagaimana perasaan kita semua. Tetapi setelah kita mendengar penjelasan dari menteri kemarin bahwa ini, apa yang disampaikan oleh teman saya tadi bahwa yang sakit itu adalah 3 orang, itu tidak lolos pemeriksaan dari kesehatan China itu sendiri. Jadi kami merasakan sudah semuanya ini kita berpikir "ini tidak apa-apalah".

Sampai dalam pemikiran saya, kalau memang Natuna tidak mau menerima, itu pindahkan ke Jambi saya bilang, saya siap berurusan dengan Gubernur Jambi. Ini saudara kita yang dinyatakan bahwa itu sehat. Jadi ini jelaskan kepada masyarakat kita, kita tanggungjawab kita sebagai pemerintah menyampaikan kepada masyarakat.

Saya katakan kepada menteri kemarin "saya siap berangkat ke Natuna dengan kawan-kawan yang lainnya". Jadi supaya menjelaskan kepada saudara kita yang ada di Natuna. Tidak ada masalah sebenarnya. Apalagi ditaruh di dalam kapal, enak-enak saja dia mau main nanti. Mendingan kita saja naik ke kapal.

Saya rasa, Adinda, jelaskan kepada masyarakat kita. Saya juga dari Jambi ini siap untuk itu. Sebenarnya kalau saya mendengar jaminan daripada menteri kemarin tidak ada masalah, jadi kami semuanya tenang.

Pak Bupati, jadi apa yang tadi disampaikan soal politik, kejam Pak politik. Mau menjatuhkan Bapak sekarang itu supaya jangan di pilih ya ini salah satu ini. Kalau Bapak tidak datang kesini jadi masalah besar. Saya sudah lima kali pemilihan, dua kali bupati, dua kali DPR, satu kali gubernur, jadi saya paham sekali bagaimana

politik. Jadi saya minta kepada Bapak, kepada saudara-saudara saya dari mahasiswa atau apa semua ini, dapat menenangkan masyarakat kita yang ada di Natuna.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya Pak, silakan.
Tolong diperkenalkan.

KETUA MPC PEMUDA PANCASILA KABUPATEN NATUNA (FADHILLAH):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Nama saya Fadhillah/Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Natuna.
Sebelum saya menjelaskan penjelasan Bapak dari.

KETUA RAPAT:

Permisi Pak.
Begini, kita nanti kasih waktu untuk menjawab semua, karena masih ada anggota-anggota lain yang akan bertanya. Jadi kita kumpulkan dulu, nanti saya beri waktu kepada Bapak untuk merespon pertanyaan dan juga pernyataan dari anggota. Jadi dikumpulin dulu. Terima kasih.
Sebelah kanan, Pak Saleh Daulay, silakan.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M. Hum., MA):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Saya Saleh Partaoni Daulay (A-480) Fraksi Partai Amanat Nasional Anggota Komisi IX DPR RI.
Terima kasih Pimpinan.

Pak Bupati beserta seluruh jajaran;
Pak Ketua DPRD beserta seluruh rombongan yang sudah hadir

Seperti teman-teman tadi saya juga mengucapkan terima kasih dan mempercayakan pengaduan masalah seperti ini ke DPR, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk betul-betul kita dengarkan.

Pertama, tadi memang saya terlambat, tapi tidak ada satupun kalimat yang lepas dari pendengaran saya, karena saya langsung memonitor karena saya merasa ini sangat penting. Kebetulan saya agak macet tadi, tapi saya tahu persis apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan juga Pak Ketua DPRD, sehingga dengan demikian nanti saya akan mengelaborasi satu-satu dengan permasalahan yang disampaikan.

Pertama, saya merasa bahwa kedatangan Pak Bupati kesini dan seluruh rombongan ini bukanlah merupakan penolakan sebetulnya, bukan menolak. Ini harus dicatat juga bahwa Natuna baik pemerintahnya maupun masyarakat

sebetulnya tidak menolak. Tapi ada persoalan etis sebetulnya yang menurut saya, dan saya sudah berkali-kali menyampaikan itu juga di media bahwa tiba-tiba langsung di tunjuk Natuna itu, itu jadi persoalan sebetulnya. Dan kemarin waktu rapat dengan Menteri Kesehatan, meskipun saya tidak hadir tapi saya tahu persis apa isi rapat itu, itu juga sudah dipersoalkan. Karena sehari sebelum itu saya komunikasi dengan Dirjen P2P yang menangani masalah persoalan ini dengan Kementerian Kesehatan, memang mereka belum punya skema pemulangan seperti apa, ditempatkan dimana, dan sebagainya belum ada. Hingga pada malam harinya saya dengar ada rapat memang, rapat koordinasi, yang menentukan harus diputuskan satu tempat. Akhirnya ditentukanlah di Natuna. Dan saya berdo'a semoga rakyat Natuna ini diberi pertolongan oleh *Allah Subhaanahuata'aala* karena keikhlasannya menerima saudara-saudara kita yang dari Wuhan, dan mudah-mudahan semuanya sehat wal'afiat selama mereka di observasi. Kalau kata Pak Bupati tadi "dihaluskan namanya jadi observasi, sebetulnya di karantina".

Itu yang pertama yang saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, Saudara-saudara seluruh Anggota DPR yang saya hormati, sebetulnya harus ada yang konkrit dari pertemuan ini. Jadi bukan hanya sekedar kami prihatin, kami berdo'a, bukan. Do'a dan keprihatinan penting, tapi ada hal-hal yang konkrit yang sebetulnya juga harus ditindaklanjuti oleh kita.

Pertama, tadi ada keinginan untuk bertemu dengan Presiden, ini amanah dari masyarakat disana. Kalau ini saya kira nanti prosedurnya saya minta Pimpinan Komisi untuk menyampaikan kepada Pimpinan DPR, karena kita punya atasan juga disini, Pimpinan DPR, untuk langsung mengkomunikasikan dengan pihak istana supaya pemerintah daerah kita ini yang dari Natuna ini bisa diterima, biar mereka langsung menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka itu kepada Presiden.

Saya kira itu yang pertama, karena itu tadi Pak Bupati menyampaikan poin pertama itu. Jadi ini tolong dicatat, nanti Pimpinan saya kira bisa menyampaikan ke Pimpinan DPR.

Kemudian yang kedua, ada keinginan agar masyarakat yang di observasi itu di pindahkan ke kapal perang. Kan itu tadi bahasanya itu. Saya kira mungkin ini akan ada diskusi agak Panjang, bisa jadi lebih dari tiga minggu baru selesai masalahnya, sementara karantina kan hanya 14 hari.

Jadi apakah dipindahkan atau tidak dipindahkan, kalau andaikata pun misalnya ada keputusan untuk dipindahkan, itu waktunya untuk memindahkan itu sendiri itu bisa lebih lama daripada waktu karantina yang dibutuhkan itu. Karena itu saya ingin ada nanti solusi yang sangat bijaksana dari kita semua untuk supaya ini bisa diselesaikan. Kalaupun misalnya tidak jadi dipindahkan lalu apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah sehingga masyarakat disana, pemerintah disana menerima.

Jadi saya ingin bertanya juga kepada Pak Bupati, andaikata memang nanti ini tidak jadi dipindahkan, atau Pemerintah agak kesulitan untuk melakukan mekanisme itu atau pemindahan itu, apa yang dituntut oleh Pak Bupati dan jajaran pemerintah daerah dan juga legislatif disana, dan juga masyarakat disana, sehingga ini tetap bisa diterima walaupun mereka tidak dipindahkan. Ini saya kira penting catatannya, supaya kita juga bisa menindaklanjuti ini.

Kemudian tadi Pak Bupati mengeluh "tipe rumah sakit kami itu C, *kok* ditaruh disana?" Inikan jadi persoalan juga. Mestinya kalau memang dia C itu bukan tempat yang baik, kan kurang lebih begitu. Carilah rumah sakit yang memadai, seperti RSPI yang kemarin di sidak oleh Komisi IX, Sulianti Saroso, atau tempat lain. Kenapa mesti Natuna? Alasan-alasan itu yang belum diterima oleh mereka, karena ini

penting juga saya kira untuk kita cari jawaban yang memuaskan. Kalau saya itu jawaban yang memuaskan untuk mereka ini, untuk pemerintah daerah dan yang lain-lainnya itu, kita desak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menaikkan statusnya. Jangan tipe C lagi, kita naikkan jadi tipe B, atau tipe A. Bagaimana caranya, kita dorong anggarannya.

Inikan ada barter ini disini, mereka mau menerima dengan sukarela, “tapi kami dapat apa?” Ini contoh saja, Pak Bupati. Bukan berarti ini harus jadi usulan. Tapi bolehlah, ini keikhlasan mereka inikan harus disahuti dengan program konkrit dari Komisi IX. Saya akan memperjuangkan hal ini, saya minta supaya rumah sakit umum daerah Natuna ini kita perjuangkan secara bersama sebagai bentuk apresiasi kita sebagai bangsa kepada saudara-saudara kita yang ada di Natuna. Jadi kan sekarang dia tipe C, mohon dinaikkan statusnya.

Kemudian Menteri Kesehatan kan diminta untuk berkantor disana. Memang Menteri Kesehatan sudah melaporkan disini juga kemarin bahwa sudah berkantor disana, saya kira itu sudah terpenuhi, tidak usah didiskusikan lagi.

Kemudian tadi Pak Bupati mengatakan sudah dibangun posko pelayanan cepat tanggap, kemudian posko pelayanan terpadu dan lain sebagainya. Saya kira ini hal yang bagus, dan itu kita apresiasi. Dan mudah-mudahan posko pelayanan cepat tanggap dan terpadu ini tidak hanya pada kasus ini. Kita berharap ini akan berlanjut lagi pada saat-saat yang akan datang, karena itu perlu *supporting* dari kita bagaimana kita bisa berpihak kepada mereka yang tadi itu.

Inikan masalahnya Natuna dianggap daerah terpinggir dan perbatasan, tentu ini jadi perhatian. Karena salah satu program unggulan dari Presiden Jokowi adalah memperhatikan daerah perbatasan dan pinggiran itu, oleh karena ini menjadi salah satu komitmen kita untuk *men-support* ini. *Support*-nya nanti di dalam proses pembahasan anggaran yang akan datang. Saya kira ini penting untuk kita dengar semua, dan nanti jadi komitmen bersama. Bukan hanya saya secara pribadi, tapi kita semua, dan kalau itu disetujui oleh teman-teman.

Yang berikutnya tadi, memang sosialisasi dulu baru di eksekusi. Jadi jangan sampai tiba-tiba sudah datang baru di sosialisasikan. Memang itu tadi sudah kita proses, sudah selesai, mudah-mudahan kedepan tidak terjadi lagi.

Kemudian soal *istighosah* tadi Pak Imam Suroso mengatakan setuju sekali ada *istighosah*.

Saya ingin menanggapi sedikit ini persoalan tadi ada usulan agar Natuna menjadi provinsi ini. Pak siapa tadi yang dari sekolah tinggi Agama Islam tadi. Ini politis ya. Tidak apa-apa Pak kalau sekedar usulan. Itu di dapil saya itu ada tiga provinsi yang mau dimekarkan. Sudah berpuluh tahun itu perjuangannya, tidak jadi-jadi juga Pak. Tapi maksud saya jangan terlalu melebar juga ini sebetulnya persoalan kita ini. Jadi kalau nanti lari ke pengembangan provinsi itu urusan yang lain lagi. Itu Ibu Nini itu, Wakil Ketua/Ibu Nihayatul Wafiroh, ini mantan Wakil Ketua Komisi II, dia tahu persis bagaimana mekanisme pembentukan provinsi dan bagaimana tingkat kesulitan-kesulitan, kerumitan, dan macam-macam. Tapi sebagai bentuk aspirasi ini tentu harus kita dengar.

Kalau persyaratannya tidak mencukupi segala macam kan tidak ada halangan. Sekarang kan saya tanya Bapak dulu, apa sudah memenuhi persyaratan semua? Kan belum tentu juga kan. Ini idenya bagus. Apalagi sekarang, Natuna inikan banyak diperbincangkan. Saya sekarang menginginkan itu nama batas wilayah Laut China Selatan itu diganti Pak. Kita buat Laut Natuna Utara. Harus diganti, jangan Laut China Selatan. Karena kalau masih ada nama ‘China’ disitu seakan-akan itu punya China. Dan dengan demikian kalau kita buat ‘Latu Natuna

Utara', dengan cara menyebut 'Laut Natuna Utara', bahwa bangsa kita ini merasa memiliki klaim terhadap laut itu. Kalau tetap namanya 'Laut China Selatan' mereka ambil ikan disitu, yang rugi warga kita. Jadi saya setuju itu, itu penting untuk meneguhkan bahwa ini adalah daerah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau yang soal gejala masyarakat, kemudian diskusi, dan bagaimana para wakil rakyat disana itu datang ke masyarakat, itu tugas Pak, jadi sudah tanggungjawab kita untuk menenangkan mereka. Saya membantu berdo'a supaya Bapak tenang juga untuk melakukan tugas-tugas itu dengan ikhlas, supaya masyarakat kita tenang dan bisa menerima ini. Dengan tadi itu catatan-catatan yang saya sebutkan di atas itu, mudah-mudahan ada sesuatu yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Natuna sebagai bentuk perhatian, sehingga pemerintah disana dan masyarakatnya juga bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari hikmah dibalik apa yang sedang terjadi saat ini.

Saya kira itu, Pimpinan.
Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Di Kepri kabupaten yang belum pernah saya datangi, dan ingin sekali saya datangi, adalah Natuna dan Anambas.

Silakan Pak Nabil untuk penanya selanjutnya. Lalu sayap kanan, Ibu Intan.
Silakan Pak Nabil.

F-PDIP (MUHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Saya Muhamad Nabil Haroen dari Fraksi PDI Perjuangan nomor A-191.

Kemarin waktu *live* di salah satu stasiun TV swasta, saya bersama salah satu masyarakat Natuna juga, waktu itu Pak Rodial atau siapa saya lupa namanya, kemudian saya mendapatkan 6 tuntutan masyarakat Natuna yang kemudian atas ijin teman-teman juga dibacakan disini, dan langsung ditanggapi oleh Pak Menteri Kesehatan. Hanya ada satu item saja yang Beliau tidak bisa penuhi soal dialihkan ke kapal. Dan mendengar penjelasan dari Pak Menteri saya pikir cukup masuk akal soal pemindahan itu. Memang yang perlu diperbaiki dan menjadi kritik dari teman-teman Komisi IX adalah pola atau manajemen komunikasi informasi yang harus diperbaiki antara kita semua, sehingga program atau apapun itu kemudian bisa diterima dengan baik.

Kemudian secara terpisah saya juga kemarin mengkritik tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat menghadapi para demonstran yang ada disana, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi ini. Karena saya yakin ada pihak yang ingin sengaja mengadu domba masyarakat Natuna dengan kita semua.

Karena bagi saya tidak logis kemudian menolak warga negara Indonesia yang sehat pulang ke Indonesia. Itu kan tidak logis, sangat tidak logis. Oleh

karenanya saya yakin Pak Bupati dan Ketua DPRD berikut tokoh-tokoh masyarakat ini betul-betul bisa menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat. Dan kemarin juga kita minta Kementerian Kesehatan dalam melakukan pola komunikasi kepada masyarakat juga tidak lagi dengan cara-cara yang konservatif, tapi dengan cara-cara yang kekinian, yang *up to date*, sesuai dengan jamannya, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu betul-betul selaras dengan kemaslahatan. Atau kalau dalam bahasa pesantren itu *tashorroful imam 'alal roiyah manutun bimaslahah*.

Mungkin hanya itu.
Terima kasih.

*Wallohulmuaafiq Illaa Aqwaamiththooriq.
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Selanjutnya sebelah kanan, Pak Fadholi, silakan.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Perkenalkan nama saya Fadholi dari Fraksi Partai Nasdem dapil I (satu) Jawa Tengah.

Yang saya hormati, Bapak/Ibu Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota, Bapak Walikota, dan seluruh jajaran dari Natuna yang sangat saya banggakan.

Bersama kita menyampaikan satu ungkapan yang sangat luar biasa atas perjuangan dari Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang pada kali ini bisa ketemu pada kita bersama. Saya memberikan satu penghargaan perjuangan ini dengan baik, dan kami mengerti suasana bathin yang dihadapi. Tadi sudah banyak disampaikan terlepas dari itu beberapa persoalan, tetapi ini adalah kenyataan yang saat sekarang ini pemerintah dari Natuna mempunyai satu hal yang sangat dilematis. Ini kita mengerti sekali. Dan untuk bisa mengurai ketika kemudian nanti ada apakah ditumpangai pihak lain dan tidak itu perlu waktu Panjang. Tapi persoalannya adalah bagaimana saat sekarang ini untuk bisa menyelesaikan persoalan ini.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saleh bahwa harus ada satu tindakan konkrit yang memang kita sepakati bersama-sama. Kalau persoalan pilkada saya yakin semua ada di garis tangan kita. *Insyaa Alloh* kalau tidak menanganai dengan baik pasti Bapak akan terpilih lagi. Aamiin, percayalah untuk itu.

Persoalannya saat sekarang ini yang perlu dihadapi bagaimana perkembangan yang sekarang sedang di observasi atau di karantina itu perkembangannya bagaimana. Apakah Bapak sudah ada satu informasi dari sana? Apa perkembangannya itu sudah semakin bagus atau semakin kritis?

Kemudian yang kedua, apakah ada gejala masyarakat yang kemudian terkena penyakit akibat adanya karantina itu? Kalau semakin hari ini semakin bagus

kan berarti kita tidak perlu membahas yang terlalu banyak. Dari hari ke hari kalau itu memang ada satu virus yang kemudian bisa menular dan lain sebagainya, pasti itu sekarang sudah ada gejala-gejala itu.

Harapan saya bahwa kemarin seperti sudah kita rapat bersama-sama, salah satu yang sekarang harus dilakukan adalah segera di drop sebanyak mungkin, secukup mungkin tenaga medis untuk bisa mengantisipasi terhadap warga yang ada disana untuk bisa tidak terkena penyakit ini. Ini penting. Meminta agar Menteri Kesehatan sekarang segera drop dengan semua peralatannya. Dan pencegahannya apa yang diperlukan disana sekarang dibawa kesana. Kemudian sekarang juga langsung diadakan satu tindakan apakah ada masyarakat yang sudah terkena virus akibat adanya dari 240 WNI kita yang datang disitu.

Saya tidak mempersoalkan Bapak kemudian menolak dan tidak menolak itu.

KETUA RAPAT:

Ijin, Pak Fadholi, mungkin fokus saja ke ini. Kalau soal virus siapa yang sudah kena pasti Kementerian Kesehatan yang lebih mempunyai data.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Makanya saya minta agar saat sekarang ini nanti dari kita meminta dari Kesehatan segera mengirim tenaga medis yang sebanyak mungkin untuk bisa mengantisipasi itu. Ini penting.

Saya mengerti bahwa ketika kemudian menolak, karena kekhawatiran. Tetapi saat sekarang kan sudah terjawab, ini semuanya sudah terjadi. Harapan saya bahwa saat sekarang ini, Komisi IX kemarin sudah rapat, tetapi kita tandaskan lagi agar sekarang yang pertama karena persoalan ini yang dianggapnya adalah persoalan nyawa, kesehatan, terancam jiwa, maka saat sekarang perlu diadakan tindakan medis, pencegahan. Ini penting. Dan diberikan satu pernyataan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kalau memang ini tidak akan ada satu penyakit yang menular sampaikan juga, dan kemudian disosialisasikan di tengah masyarakat disana bahwa ini tidak akan ada penyakit yang menular.

Inikan persoalannya bukan tidak menerima masyarakatnya, tetapi yang di tolak penyakitnya kan. Bukan menolak orangnya, tetapi kan menolak penyakitnya. Maka yang harus kita atasi adalah penyakitnya. Jadi menurut saya itu menjadi hal yang sangat penting.

Bilamana kalau kita memang perlu kesana, Komisi IX bersama dengan kementerian, kita kesana bareng-bareng.

KETUA RAPAT:

Kemarin kan sudah kita sepakati itu Pak.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Makanya ini untuk meyakinkan untuk hal itu.
Ibu Ketua, semacam itu Ibu Ketua, terima kasih

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terakhir ya, Ibu Intan. Habis ini memberikan waktu kepada tamu-tamu kita untuk memberikan respon.

Silakan Ibu Intan, fokus.

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANI FAUZI, S.H., LL.M):

Terima kasih Ibu Ketua.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera.

Saya Intan Fauzi (A-499) Fraksi Partai Amanat Nasional.

Pimpinan dan Anggota, Pak Bupati, Ibu Wabup, Adinda Ketua DPRD, dan Bapak-bapak/Ibu-ibu perwakilan masyarakat.

Kami sebagaimana teman-teman sudah jelas empati, yang pertama adalah kami melihat dan mendengar langsung pernyataan pemerintah pusat, dan pada saat itu masih bergejolak di Natuna karena merasa bahwa ini adalah sepihak/keputusan sepihak. Memang kita tahu pemerintah pusat punya kewenangan dalam hal *emergency*, dan kemudian menurun sampai pada pagi hari ini. Pak Bupati sudah sangat memahami kebijakan pemerintah pusat. Dan saya memang juga bisa memahami bagaimana kondisi saat itu bapak-bapak pimpinan yang ada di daerah sedang berada di luar untuk kepentingan yang jauh lebih penting juga.

Kami disini kemarin rapat dengan Kemenkes tidak hanya bicara virus Coronanya sendiri, tapi bicara mengenai Natuna, dan sudah termaktub di dalam notulen rapat, antara lain adalah kami meminta secara tegas Menkes. Bukan bicara 'Kemenkes' ini, 'Menteri Kesehatan' berkantor disana, dan Beliau setuju. Itu untuk menenangkan masyarakat. Jadi jangan hanya lempar kepada pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah menanggulangi sendiri. Dan kami sendiri pun berempati terhadap warga Natuna.

Yang kedua adalah mengenai sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes itu ada banyak tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk dua diantaranya adalah di Kepri. Dan prasyaratnya adalah satu, alat kesehatan yang cukup, dua tenaga medis yang memadai, dan itu dipenuhi di dalam dua rumah sakit yang ada di Kepri. Kita tidak bicara Natuna ini, karena Natuna kan masuk rumah sakit militernya.

Mungkin satu bisa dijadikan tuntutan Pemda Natuna adalah ruang isolasi tekanan negative. Karena itu ada di rumah sakit lain tapi tidak ada di dua rumah sakit yang ditunjuk, padahal itu adalah salah satu prasyarat. Dan tertulis dari paparan Kemenkes di Kepri itu hanya ruang isolasi biasa. Kalau China bisa membangun 10 hari rumah sakit, kita tidak bicara membangun rumah sakit, tapi minta ruang isolasi negative. Dan itu sangat wajar karena memang warga tentu harus mendapatkan kenyamanan.

Kalau kemudian pemerintah kita/PMI menyumbang masker dan sebagainya ke Hongkong, saya bukan provokasi, tapi kenapa warga Natuna tidak diberikan hak yang sama. Karena sebetulnya kita dengan *legowo* menerima saudara-saudara kita, dan itu mereka adalah orang yang memang sudah lolos sehat. Bukan hanya dari pemerintah kita tapi juga dari WHO. Tapi juga minta untuk fasilitas bagi warga Natuna 80 ribu yang sudah menyediakan tempatnya, dan juga pastinya koordinasi dan sebagainya cukup merepotkan di Natuna. Jadi saya pikir bukan hal yang terlalu tinggi bagi warga Natuna menuntut hal tersebut, juga kemudian meminta bertemu Presiden dan sebagainya, karena supaya ada kejelasan. Karena di Natuna sendiri begitu ada gejolak, ada pergantian Kapolres dan sebagainya.

Dan ini juga mungkin buat pengetahuan teman-teman, Pak Bupati ini sudah dua periode, jadi kalau kemudian digoreng lagi bahwa akan ada ini masalah pilkada dan sebagainya. Pak Bupati ini sudah dua periode, jadi kasihan. Sudah harus menerima sepihak kemudian digoreng lagi dengan isu-isu, jadi sabar Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, dan Ibu.

Saya sekali lagi kami semua berempati, dan kemarin kami sudah sampaikan kepada Pak Menkes.

Terima kasih.

*Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah.
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

F-PKS (Dr. Hj. NETTI PRASETIYANI, M.Si):

Pimpinan, izin sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Sedikit ya Bu, karena waktu kita tinggal 3 menit.

F-PKS (Dr. Hj. NETTI PRASETIYANI, M.Si):

Sedikit saja.
Terima kasih Pimpinan.

Pak Bupati, Ketua DPRD, dan seluruh unsur masyarakat Natuna yang saya cintai, saya banggakan.

Karena sudah banyak yang dibahas tadi oleh teman-teman, tentang fasilitas, tentang aspek politik dan sebagainya, justru saya ingin menegaskan disini jangan sampai kita hanya bisa bersorak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat pertandingan sepak bola di mata dunia internasional, tapi saatnya mari kita tunjukkan rasa ke-Indonesia an kita bahwa kita adalah bangsa besar, sebuah keluarga besar Indonesia, senasib sepenanggungan. Justru energi dan aura positif

itu harus kita tunjukkan. Dan saya angkat jempol bahwa Natuna memberikan contoh yang baik pada wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia bahwa siap menerima warga yang suka atau tidak suka mereka kemudian mendapatkan situasi seperti ini. Pasti tidak ada satupun dari kita yang kemudian ingin mendapatkan ujian seperti ini, tapi ternyata masyarakat Natuna siap menunjukkan rasa ke-Indonesiaan yang besar bagi seluruh wilayah Indonesia.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

F-NASDEM (RATU NGADU BONU WULLA, S.T):

Interupsi, Pimpinan. Interupsi, Ratu, satu menit saja.

KETUA RAPAT:

Maaf Ibu, waktunya sudah kurang satu menit.

KETUA DPRD NATUNA:

Mohon kami dikasih kesempatan lagi, karena waktu terbatas. Kami masih banyak yang mau kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Iya, makanya kami mau menyampaikan.

Ibu Ratu, saya mohon ijin saya berikan waktu ke ini dulu ya.

Mohon fokus. Jangan fokus soal isu politik, mohon dikesampingkan. Karena kita sekarang fokus pada persoalan kemanusiaan.

Silakan yang mau mewakili. Dari Ketua DPRD silakan.

Mohon maaf, Ibu Rabu.

KETUA DPRD NATUNA:

Terima kasih.

Saya ingin menanggapi sedikit dari Bapak-bapak Anggota DPR RI Komisi IX.

Tadi saya sangat setuju bahwasanya dari Fraksi Partai Amanat Nasional menaikkan tipe RSUD. Saat sekarang ini kalau rumah sakit RSUD Natuna minim peralatan medisnya. Kalaupun hari ini terjangkit virus Corona itu di Natuna, batuk, pilek, segala macam, kami tidak bisa memastikan itu penyakit Corona atau tidak. Karena apa, alat medisnya tidak ada. Itu salah satu.

Jadi kami mohon maaf, Ibu, bukan kami bukan Indonesia. Kami NKRI utuh, Ibu. Selama ini kami sangat menjunjung tinggi NKRI. Kami merah putih. Kalau China menyerang kami, kami siap garda di depan, kami siap ditembak.

Jadi kalau saya ingin memprovokator masyarakat, saya juga orang biologi, saya juga mengerti virus, dan saya disini melihat adanya beberapa langkah yang

tidak konkrit untuk penanganan virus tersebut. Karena apa, ini katanya dari petugas medis yang ada di Natuna/ yang diturunkan di Natuna itu, bahwasanya ini adalah SOP WHO. Turun dari Wuhan itu, turun ke Batam, setidaknya, ini saya saran, bukan saya mengajari, tapi ini salah satu langkah konkrit untuk supaya masyarakat juga tidak resah dengan langkah-langkah itu, jadi penanganannya sebisa mungkin dari pesawat itu dibikin lorong supaya tidak terkontaminasi dengan udara bebas, dan disemprotkan dengan disinfektan, jadi agar masyarakat kami juga “oh berarti ini memang *safety* betul-betul langkahnya”.

Jadi itu dilakukan hanya di Natuna. Alasannya apa? Alasannya kurang tenaga medis. Ini darurat internasional, masa masih bisa dikatakan kurang tenaga medis. Ini adalah perintah presiden, masa Menkes tidak memerintahkan tenaga medis seluruh Indonesia yang bisa dijemput satu persatu. Jadi ini yang membuat masyarakat kami resah. Belum pernah saya mengatakan itu kepada masyarakat kenapa? Karena kalau saya sampaikan itu kepada masyarakat, makin bergejolak di Natuna. Karena saya paham langkah-langkah itu.

Saya juga dulu waktu kuliah saya juga di lab masalah bakteri, virus, dan saya belajar itu. Dan itulah yang membuat saya paham juga psikologis masyarakat kita Natuna memang ternyata langkah-langkah yang seperti itu yang diabaikan.

Dan saya juga disana terasa nyawa itu di ujung tanduk. Karena apa, karena saat masyarakat Natuna bertemu Pak Menteri, dan menjanjikan Pak Menteri itu jam sepuluh malam (22.00) harus ada kebijakan dari Pak Menteri, dan Pak Menteri tidak bisa ditemui dan tidak bisa dihubungi. Saya di sandera dan dibawa ke jalan. Sampai jam lima subuh (05.00) kami menunggu Pak Menteri, dan Pak Menteri tidak hadir disitu. Dan tadi saya juga sudah mendengarkan permintaan maaf Pak Menteri terhadap masyarakat Natuna bahwasanya dari stafnya tidak memberikan ijin keluar, dan sedangkan Pak Menteri ingin menemui kami. Tapi disitu Pak Menteri juga lupa ada Anggota DPR yang Pak Menteri alihkan nyawanya ke kami. Jadi kami ingin kemarin itu pernyataan Pak Menteri sedikit juga bisa kami terima iya atau tidaknya informasi itu, itu saja. Jadi bisa kami sosialisasikan kembali kepada masyarakat. Jadi pernyataan itu yang tidak kami terima, dan kami jadi sasarannya.

Mungkin hari ini pelampiasan saya, karena sudah tiga hari tiga malam saya mendampingi teman-teman ini. Karena kami perpanjangan tangan dari masyarakat, dan kami juga bukan provokator, tapi malah kami menjaga masyarakat kami supaya jangan ada gesekan antar TNI/Polri dan masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Luar biasa sekali Ketua DPRD dari Kabupaten Natuna, jadi benar-benar hadir untuk masyarakat. Dan itu juga yang sebenarnya kita semua, mulai DPR RI hingga DPR Kabupaten itu yang harus kita lakukan.

Saya kasih ijin ke Bapak dulu ya, karena tadi Bapak yang sudah bicara. Habis itu Bapak. Silakan Pak.

Mohon maaf, saya perpanjang 10 menit, karena nanti kami jam satu (13.00) juga sudah ada agenda. Sepakat ya 10 menit.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan.

KETUA PANCASILA NATUNA:

Terima kasih.

Saya singkat saja.

Ada tiga poin yang harus saya sampaikan kepada Bapak/Ibu yang terhormat. Pertama, Natuna NKRI harga mati.

Kedua, Gerakan yang kemarin tiga hari tiga malam itu jangan dilibatkan atau dituduhkan pada elit politik, karena itu murni spontanitas masyarakat Natuna. Karena ketidaktahuan mereka tentang Corona ini sehingga kekhawatiran terhadap anak/istri. Dan untuk hari ini saja sekolah-sekolah masih banyak libur, pasar-pasar masih banyak tutup, dan masih banyak juga warga kami yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Karena Natuna itu bukan satu pulau, banyak pulau-pulau kecil-kecil. Dan Bukit Raya kemarin membludak penumpang yang kembali ke Selasan, Midai, dan Kalimantan. Itu gambaran ketakutan masyarakat. Tidak ada politik disini.

Yang ketiga, kami juga merasa sedih, disaat merasakan kami dalam ketakutan, dalam kesusahan dengan isu Corona ini, tetapi bapak-bapak yang dari luar menyalahkan kami seakan-akan kami tidak NKRI, seakan-akan kami tidak nasionalis. Kalau kami diberitahu dari awal *Insyah Alloh* kami akan menyambut tamu kami dengan baik. Karena Natuna daerah Melayu yang hormat kepada tamunya.

Mohon maaf Bapak, kalau memang Bapak berkeinginan untuk menyambut tamu itu kami ikhlas, besok boleh bawa ke Jambi. Artinya jangan tantang kami itu Pak. Kami sudah cukup susah menjaga warga kami, susah menjelaskan kepada warga kami, tapi kami disalahkan. Dari Aceh ada yang menyerang kami seakan-akan kami tidak NKRI, dari Jambi juga menyerang kami. Tolong juga bantu kami tenangkan masyarakat kami. Pemberitaan yang di pemerintah yang membuat Bapak-bapak mungkin menilai kami salah. Lokasi karantina itu hanya 1,3 kilometer dari pemukiman masyarakat. Paling jauh 1,7. Tapi panglima mengatakan 6 atau 5 kilometer. Ini yang salah. Dan Menteri Kesehatan juga berjanji di depan kami/masyarakat Natuna bahwa akan menyambut tamu yang dari China itu dengan tangan kosong. Kalau nanti saya pakai peralatan, tembak di depan dada saya. Itu ucapannya, tapi inikan pembohongan-pembohongan yang dilakukan. Kami selalu menjaga, dari KNPI, dari STAI, dan Pemuda Pancasila tetap menjaga NKRI itu, dan supaya masyarakat kami tenang. Jadi itu tolong dihargai juga perjuangan kami untuk menjaga masyarakat kami. Janganlah kami disalahkan, tidak nasionalis, dan tidak NKRI.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Silakan Pak.

MASYARAKAT NATUNA:

Tadi bang Fadhillah sudah menyampaikan bahwa ini tidak ada isu politik itu. Saya berada di garda terdepan. Saya ini PNS, saya malah melawan kebijakan ini.

Saya siap di pecat kalau saya PNS berada di garda terdepan. Jangan di tuduh ini politik, ini merupakan keresahan kami, keresahan masyarakat Natuna. Mengapa Natuna yang dipilih? Tidak ada sosialisasi, tidak ada informasi yang diberikan. Mengapa Natuna yang dipilih? Katanya sehat, kok sehat Natuna yang di isolasi dengan peralatan yang tidak memadai di Natuna. Rumah sakitnya yang tidak ada tenaga medis yang memadai, peralatan tidak memadai. Mengapa tidak di daerah lain yang fasilitasnya lengkap, rumah sakitnya lengkap, tenaga medisnya lengkap, isolasi disana. Kalau terjadi apa-apa ini tidak akan membahayakan karena serba fasilitas lengkap. Di Natuna itu tidak ada apa-apa.

Oke mereka menyatakan aman, mengatakan sehat. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat Natuna, kemana mau di evakuasi masyarakat Natuna, kemana mau diobat, siapa yang mau menanggung biaya pengobatan kami. Karena kalau kami di Natuna dibawa ke Batam, di bawa keluar daerah, itu biayanya mahal, pakai pesawat.

Jadi kami harap konkritnya. Inikan sudah terjadi, tidak bisa kita elakkan lagi, segeralah bangun pos pelayanan kesehatan disana. Besok kalau bisa hadir disana dengan petugas medis, dengan peralatan medis, dengan psikiater kalau perlu. Siapa yang berani menjamin ini tidak akan terjadi penularan ini? Ini yang ditakutkan masyarakat Natuna. Bukan kami tidak NKRI, bukan kami tidak sayang dengan warga negara kita yang di evakuasi itu. Kami cinta mereka, tapi tolong beri penjelasan kepada kami.

Tidak ada satupun pejabat pemerintah pusat yang hadir di kami, mereka terisolasi di dalam sana. Apa yang mereka perbuat disana kami tidak ketahui. Coba mereka hadir keluar, hadir ke perkampungan kami, berkantor disana, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa mereka hadir di tengah masyarakat tidak terpengaruh dengan virus ini. Kalau di dalam siapa yang tahu. Janji Pak Menteri kemarin akan menyambut dengan tangan terbuka tanpa *safety*. Kami lihat itu pakai *safety* semua, pakai kayak robot semua menyambut mereka. Inipun suatu kebohongan publik yang dilakukan.

Belum lagi lokasi isolasi yang dekat dengan pemukiman masyarakat itu. Mereka berkata itu 5-6 kilo jauhnya dari pemukiman masyarakat, itu tidak benar sama sekali. Itu sangat dekat sekali.

Jadi tolonglah ada hasil konkrit.

Terima kasih.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M. Hum., MA):

Interupsi Pimpinan.

Tidak apa-apa Pak, lanjut dulu.

Itu kedekatannya berapa kilo, yang benarnya berapa sebetulnya? Kan klaimnya Pemerintah 6 kilo.

MASYARAKAT NATUNA:

Ada kampung tua, itu tidak sampai jaraknya satu kilo. Paling jauh itu 1,7 kilometer dari lokasi isolasi. Bukan 5 sampai 6 kilometer. Ini suatu hal yang ditutup-tutupi.

Jadi tadi kan Bapak mengatakan ini suatu kejadian, pejabat pusat saja *stress* menghadapi ini sehingga tidak tahu apa yang mereka perbuat, sehingga keputusan terakhirnya adalah Natuna yang ditetapkan. Pemerintah saja *stress* atau tidak siap,

apalagi masyarakat Natuna yang tidak tahu sama sekali dengan virus ini. Tahunya kita melihat di TV ini berbahaya, orang pakai kayak astronot semua menanggulangnya. Ini yang datang ke Natuna ini, siapa yang menjamin mereka bebas terhadap ini.

Jadi tolong nanti harus ada jaminan biaya kesehatan kalau terjadi apa-apa itu siapa yang menanggung. Harus Pemerintah yang menanggung itu. Karena biaya untuk ke Batam, ke Kepri, itu sangat mahal sekali kalau di Natuna. Tidak ada transportasi yang murah keluar dari Natuna.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Waktu sudah kurang dua menit lagi, ada beberapa hal sebelum saya tutup.

Yang pertama adalah persoalan posko pelayanan. Kami dari Pimpinan Komisi IX akan langsung mengontak.

Surat tentu akan kita lakukan secara prosedural, tapi secara informal tentu akan kita langsung kontak ke Menteri Kesehatan. Disini kita akan kontak Menteri Kesehatan untuk segera membangun posko-posko pelayanan. Bukan hanya di tempat observasi, tapi juga di tengah masyarakat, sehingga bila masyarakat merasakan gejala-gejala sesuatu yang kurang nyaman bisa langsung masuk ke posko.

Yang kedua soal biaya. Kemarin Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa seluruh biaya terkait ini, kena *suspect*. Cuma nanti harus kita sampaikan juga, bukan hanya kena *suspect*, tapi masyarakat Natuna juga, ini untuk di *cover*. Saya tahu perjalanan cukup jauh dari Natuna ke Batam, dan itu membutuhkan biaya.

Selanjutnya yang ketiga, kita akan melakukan komunikasi juga, seperti usulannya Pak Saleh Daulay untuk komunikasi dengan pimpinan kami/Pimpinan DPR RI untuk bisa menyampaikan aspirasi Bapak/Ibu, terutama keinginan untuk bertemu Presiden.

Jadi tiga poin yang saya pikir saya sepakat tidak perlu berpikir kebelakang lagi, karena kondisinya sudah ada disana. Tapi yang perlu kita laksanakan adalah bagaimana antisipasi kedepannya seperti apa.

Jadi posko pelayanan akan kami pastikan akan segera kami komunikasikan, kedua biaya, dan juga komunikasi dengan Pimpinan DPR terkait permintaan dari warga Natuna untuk bertemu Presiden.

Hasil rapat kita kemarin, Bapak/Ibu yang saya hormati, kita kemarin memang khusus rapat sehari dengan Menteri Kesehatan terkait dengan persoalan Natuna ini. Beberapa hari yang lalu kita memang fokus hanya BPJS, tapi yang kemarin kita fokus pada Natuna dan Virus Corona ini. Dan kita menyepakati Komisi IX akan melakukan pengawasan di Natuna. Sedang kita pikirkan bagaimana kesannya minggu depan. Dan kita juga akan melihat kesiapan juga dari Menteri Kesehatan. Kita minta Menteri Kesehatan untuk memberikan laporan secara periodic terkait hal ini bagaimana kesiapannya, poskonya seperti apa, nanti kita akan memantau terus Komisi IX.

Sekali lagi terima kasih kepada Bapak/Ibu Bupati Natuna, Wakil Bupati, DPRD, tokoh masyarakat, yang sudah luar biasa menyambut tamu-tamu warga

negara Indonesia yang bertamu ke Natuna. Dan semoga keberkahan, kesehatan, terlimpahkan untuk kita semuanya.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M. Hum., MA):

Jangan tutup dulu, Pimpinan, sedikit saja ini. Inikan keburuh ini sudah disini.

KETUA RAPAT:

Pak Saleh, mohon maaf, ada tadi dari mahasiswa. Saya kasih waktu satu menit ya sebelum ke Pak Saleh, silakan. Satu menit ya Mas.

MAHASISWA NATUNA:

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Perkenalkan, nama saya Randi Antami, saya merupakan perwakilan dari mahasiswa Natuna seluruh Indonesia. Disini saya ingin menyampaikan beberapa aspirasi dari hasil konsolidasi kami bersama mahasiswa di seluruh Indonesia, yaitu Mahasiswa Natuna, bahwasanya terkait yang tadi telah Ibu katakan 'pengawasan'.

Pengawasan disini kami ingin menjelaskan sedikit bahwasanya kami menyimpulkan bahwa ada dua poin yang menyebabkan terjadinya hal penolakan yang terjadi di masyarakat Natuna. Yang pertama adalah rasa takut yang dirasakan oleh masyarakat Natuna, dan yang kedua adalah ketidaktahuan mengenai yang digaungkan mengenai SOP atau standar WHO tersebut.

Yang kami inginkan mungkin, tambahan satu lagi, merupakan pengawasan yang mungkin tadi akan Ibu lakukan di lapangan, kami inginkan juga bahwasanya kami ajak dari pemerintah daerah, seperti dinas kesehatan, untuk melakukan pengawasan bahwasanya SOP yang telah digaungkan berdasarkan standar WHO itu sudah terlaksana dengan benar, sehingga kami/Masyarakat Natuna juga bisa menurunkan sedikit rasa panik kami/rasa takut kami, sehingga kami juga merasa aman.

Dan juga kami ingin disosialisasikan kembali bagaimana standar-standar WHO tersebut supaya masyarakat juga bisa mengetahui. Seperti halnya yang janggal ini adalah hanggar but yang tersebar di media itu bentuknya kurang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sepakat, nanti tentu kalau kita Komisi IX turun ke lapangan pengawasan bukan hanya dinas kesehatan, tapi DPRD nya juga pasti akan kita ajak untuk bersama-sama.

Terakhir, Pak Saleh Daulay.

F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M. Hum., MA):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Teman-teman Anggota Komisi IX yang terhormat dan berbahagia,

Tadi saya mengusulkan sebenarnya ada komitmen dari Komisi IX. Tadi sudah ada poin-poin yang disampaikan Ibu Pimpinan. Tapi ada satu yang saya kira perlu juga diingatkan.

Inikan saudara-saudara kita di Natuna, pemerintah daerahnya juga sudah *Insyah Alloh* ikhlas dan menerima. Jadi kita kasihlah sesuatu apa ucapan terima kasih kita kepada mereka yang sekarang ini. Walaupun tadi dipersoalkan macam-macam itu, tapi untuk sementara kan realitasnya mereka sudah terima.

Jadi yang saya inginkan itu adalah bagaimana kita men-*support* anggaran APBD mereka ini untuk meningkatnya kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan disana. Jadi kita buat semacam komitmen dari Komisi IX. Itu gampang kalau Pimpinan mau itu tinggal ke Menteri Kesehatan itu tolong masukkan itu anggaran sekian untuk Natuna. Itu kalau kita sepakati hari ini dan kita perjuangkan *Insyah Alloh* itu akan terjadi, *Insyah Alloh* tahun 2021. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi semacam rekomendasi dari pertemuan ini. Ini jarang-jarang ada pemerintah yang mau, ini *alhamdulillah* inikan tidak ada yang ribut. Ributnya cuma seperti ini. Tapi *Insyah Alloh* ini akan ada positifnya untuk mereka juga.

Begitu, Pimpinan, saya usul seperti itu.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Saleh Daulay.

Aspirasi Pak Saleh Daulay saya terima dengan baik.

F-NASDEM (RATU NGADU BONU WULLA, S.T):

Interupsi, Pimpinan, saya minta waktu untuk bicara.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Ratu.

F-NASDEM (RATU NGADU BONU WULLA, S.T):

Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Natuna yang sudah menerima warga negara Indonesia untuk di karantina di Natuna. Saya pikir ini sebuah berkah buat Natuna, artinya membuka hubungan komunikasi baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga ini menjadi *bargaining* posisi. Untuk apa, pemerintah daerah meminta perhatian khusus kepada Natuna untuk melengkapi segala infrastruktur maupun sarana/prasarana yang kurang di Natuna, sehingga apabila terjadi kejadian-kejadian di kemudian hari Natuna sudah siap dengan daerahnya.

Ini mungkin saran dan usul saya, jadi saya memberikan apresiasi ini jangan dianggap sebagai 'kenapa Natuna menjadi tempat pembuangan', tidak, tetapi ini menjadi jalan pembuka komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk berjalan dengan baik untuk melengkapi fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang kurang di Natuna.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ratu.

Jadi usulan tadi kita sepakati dan kita akan godok lebih lanjut usulan tadi Pak Saleh Daulay untuk anggaran kita akan komunikasikan dan kita akan sepakati juga di rapat internal dari Komisi IX.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Ini bentuk penghargaan, bukan barter. Jadi ini bukan barter, tapi bentuk penghargaan kita bahwa rakyat Natuna sudah luar biasa menerima tamu-tamu dari seluruh Indonesia untuk bisa tinggal sementara di Natuna. Dan kami Komisi IX terima kasih kepada Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, lalu tokoh masyarakat, mahasiswa yang sudah hadir dan sudah melakukan banyak hal ke masyarakat Natuna. Semoga semua diberkahi. Dan seperti poin-poin kami akan segera melakukan.

Terima kasih dari kami. Dengan membaca *alhamdulillahirobbil 'aalamiin*, rapat kali ini kita tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.52 WIB)

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Jakarta, 4 Februari 2020
a. n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat

Yanto Supriyanto, S.H
NIP. 196305241992031001